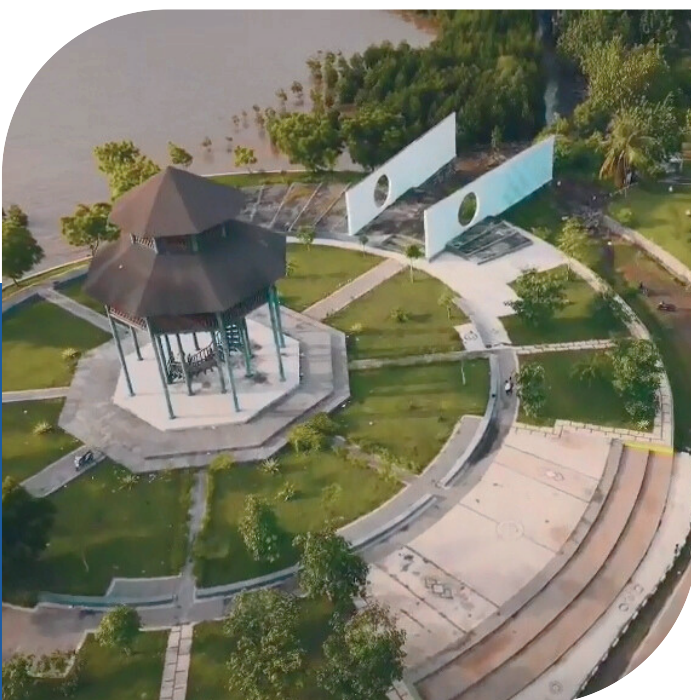




**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS KOMINFOTIK**

Laporan Hasil Survei

# INDEKS KOTA LAYAK HUNI



**PEMERINTAH  
KOTA BIMA**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan hasil Survei Indeks Kota Layak Huni (IKLH) Kota Bima Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja pembangunan perkotaan di Kota Bima dalam upaya mewujudkan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui pengukuran Indeks Kota Layak Huni, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas lingkungan permukiman, pelayanan publik, infrastruktur, fasilitas sosial, serta aspek-aspek lain yang memengaruhi kualitas hidup warga kota.

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang strategis bagi Pemerintah Kota Bima dalam merumuskan kebijakan, menyusun program pembangunan, serta menentukan prioritas kerja yang lebih tepat sasaran. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan survei ini, khususnya kepada tim pelaksana survei, para responden, serta seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan kualitas kelayakhunian Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, Desember 2025  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kota Bima,



**Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos, SH, M.Ec. Dev**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720824 199303 1 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN .....	2
1.3. MANFAAT .....	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1. KONSEP DASAR KOTA LAYAK HUNI.....	4
2.1.1. DEFINISI KOTA LAYAK HUNI.....	4
2.2. KERANGKA TEORITIS PENYUSUNAN INDEKS KOTA LAYAK HUNI.....	5
2.2.1. Teori Kualitas Hidup .....	5
2.2.2. Teori Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Urban                 Development</i> ).....	5
2.2.3. Teori <i>Urban Services</i> dan Aksesibilitas.....	5
2.2.4. Teori <i>Urban Safety dan Crime Prevention Through Environmental                 Design (CPTED)</i> .....	6
2.2.5. Teori <i>Urban Governance</i> dan Responsivitas.....	6
2.3. DIMENSI DAN VARIABEL TEORETIS PEMBENTUK INDEKS KOTA LAYAK HUNI.....	6
2.4. VARIABEL DAN INDIKATOR.....	7
2.4.1. VARIABEL .....	7
2.4.2. INDIKATOR .....	8
2.4.3. KONSEP DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR .....	10
BAB III METODOLOGI.....	19
3.1. METODE PENGAMBILAN SAMPEL .....	19



3.1.1. POPULASI .....	19
3.1.2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL .....	19
3.2. METODE PENGUMPULAN DATA .....	21
3.3. PENYUSUNAN KUISIONER .....	23
3.4. TEKNIK PENGOLAH DATA .....	25
3.4.1. Pengukuran Skala Likert .....	25
3.4.2. Perhitungan Nilai Persepsi .....	26
3.4.3. Konversi Nilai Persepsi ke Nilai Indeks / Nilai Interval (NI) .....	26
3.4.4. Perhitungan Indeks Rasa Aman (IRA) .....	26
3.5. PENGUJIAN KUESIONER .....	27
3.5.1. Uji Validitas .....	27
3.5.2. Uji Reliabilitas .....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN .....	30
4.1.1. JENIS KELAMIN .....	30
4.1.2. JENJANG PENDIDIKAN .....	30
4.1.3. SEKTOR PEKERJAAN .....	31
4.1.4. ALAMAT TINGGAL .....	32
4.2 ANALISIS DATA .....	32
4.2.1. Kecamatan Rasanae Barat .....	38
4.2.2. Kecamatan Rasanae Timur .....	38
4.2.3. Kecamatan Raba .....	38
4.2.4. Kecamatan Mpunda .....	39
4.2.5. Kecamatan Asakota .....	39
BAB V PENUTUP .....	40
5.1. KESIMPULAN .....	40
5.2. REKOMENDASI .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN I .....	44
LAMPIRAN II .....	45
LAMPIRAN III .....	46
LAMPIRAN IV .....	47





## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel. 2.1.	Indikator Indeks Kota Layak Huni	8
Tabel. 2.2	Konsep dan Definisi Variabel Indeks Kota Layak Huni	10
Tabel. 2.3	Konsep dan Definisi Indikator Indeks Rasa Aman	11
Tabel 3.1.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	26
Tabel 3.2.	Hasil Uji Validitas	27
Tabel. 4.1	Hasil Pengolahan Data	33



## . DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar.3.1.	Kuesioner Survei Kota Layak Huni Kota Bima	24
Gambar.3.2.	Tampilan Hasil Uji Reliabilitas	29



## . DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Judul Grafik	Hal
Grafik.4.1.	Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin	30
Grafik.4.2.	Klasifikasi responden berdasarkan Pendidikan	31
Grafik. 4.3	Klasifikasi responden berdasarkan Sektor Pekerjaan	32

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, nyaman, dan aman. Sebuah kota dikatakan layak huni apabila mampu menyediakan lingkungan yang bersih, tertata, memiliki akses layanan dasar yang memadai, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warganya. Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, kelayakhunian (*livability*) dan rasa aman (*sense of security*) menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah.

Kota Bima, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus mengalami perkembangan pesat baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Pertumbuhan penduduk yang dinamis, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perluasan kawasan perkotaan membawa dampak positif terhadap kemajuan daerah. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan seperti kepadatan permukiman, ketimpangan akses pelayanan publik, permasalahan kebersihan dan lingkungan, serta meningkatnya risiko sosial dan keamanan.

Sebagai kota yang sedang bertransformasi menuju tata kelola perkotaan yang modern dan inklusif, Pemerintah Kota Bima memerlukan instrumen pengukuran yang obyektif, akurat, dan komprehensif untuk menilai sejauh mana kondisi kota saat ini sudah memenuhi kriteria kota layak huni dan aman bagi warganya. Survei Kota Layak Huni merupakan langkah strategis dalam menyediakan data empiris dan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan kota, termasuk kebersihan, keteraturan, kenyamanan ruang publik, pelayanan pemerintah, hingga rasa aman terhadap gangguan sosial, kriminalitas, dan bencana.

Kota layak huni tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik yang baik, tetapi juga oleh kualitas sosial masyarakat, kinerja pemerintah, serta partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dan ketertiban. Sementara itu, rasa aman merupakan dimensi yang melekat pada psikologis masyarakat yang mencerminkan keyakinan bahwa mereka terlindungi dari ancaman dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

survei ini tidak hanya berorientasi pada penilaian fisik kota, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kultural, dan psikologis masyarakat Kota Bima.

Hasil dari survei ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Indeks Kota Layak Huni Kota Bima, yang selanjutnya digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan kota dari waktu ke waktu. Data ini juga berperan penting dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*), memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan kota yang nyaman, aman, dan berdaya saing.

Dengan demikian, pelaksanaan Survei Kota Layak Huni Kota Bima bukan sekadar kegiatan statistik semata, melainkan menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk mengukur keberhasilan pembangunan, memahami aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga Kota Bima secara berkelanjutan.

## 1.2.TUJUAN

1. Mengukur tingkat kelayakhunian masyarakat di Kota Bima.
2. Menilai kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota yang layak huni.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama yang memengaruhi kualitas hidup warga kota.
4. Menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

## 1.3.MANFAAT

1. Sebagai bahan evaluasi pembangunan perkotaan dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program prioritas.
3. Sebagai indikator kemajuan pembangunan perkotaan. Indeks Layak Huni dapat digunakan untuk memantau perkembangan kondisi kota dari waktu ke waktu.





4. Sebagai bahan komunikasi publik dan promosi daerah, karena dengan tingkat kelayakhunian dan rasa aman yang tinggi dapat meningkatkan citra positif dan daya tarik bagi investasi, pariwisata, dan migrasi penduduk berkualitas.
5. Sebagai alat advokasi Masyarakat, dengan menggunakan hasil survei Masyarakat dapat memperjuangkan perbaikan pelayanan publik, keamanan lingkungan, dan tata kelola kota yang lebih baik.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. KONSEP DASAR KOTA LAYAK HUNI

Kota layak huni adalah kota yang mampu menyediakan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memungkinkan penduduk hidup dengan aman, sehat, produktif, dan nyaman. Layak Huni (*Livability*) merepresentasikan kualitas pengalaman hidup yang diukur melalui berbagai dimensi fungsional.

Kota layak huni adalah kota yang mampu menyediakan kualitas hidup yang baik bagi seluruh penduduknya, mencakup aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, kesehatan, lingkungan yang bersih, mobilitas yang mudah, pelayanan publik yang efektif, serta kesempatan ekonomi yang memadai.

##### 2.1.1. DEFINISI KOTA LAYAK HUNI

Definisi Kota layak huni dari beberapa literatur :

1. OECD (2020)

*Livability* adalah kualitas lingkungan yang mendukung kesejahteraan penduduk, mencakup akses terhadap layanan dasar, mobilitas, kualitas lingkungan, keamanan, serta peluang ekonomi.

2. UN-Habitat (2016) – *World Cities Report*

Kota layak huni adalah kota yang memiliki kualitas hidup tinggi, infrastruktur memadai, keamanan, inklusivitas, serta tata kelola yang responsif.

3. Mercer Quality of Living Index (Mercer, 2019)

*Livability* dipandang sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, layanan publik, rekreasi, dan lingkungan.

4. The Economist Intelligence Unit – EIU (2022)

*Livability* merupakan tingkat kenyamanan bagi penduduk berdasarkan stabilitas, keamanan, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur.

5. Kementerian PUPR (2021)

Kota layak huni adalah kota yang mampu menyediakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, sehat, produktif, serta berkelanjutan bagi penghuninya

melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, ruang publik, dan kualitas lingkungan yang memadai.

6. Bappenas (2020)

Kota layak huni didefinisikan sebagai kota yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memastikan akses ke layanan publik, menyediakan kesempatan ekonomi, menjamin keselamatan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

7. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meski tidak menyebut langsung “kota layak huni”, undang-undang ini menegaskan bahwa kawasan permukiman harus layak huni, yaitu memenuhi syarat keselamatan, kenyamanan, kemudahan mobilitas, kesehatan lingkungan, dan akses terhadap prasarana serta sarana dasar.

## 2.2. KERANGKA TEORITIS PENYUSUNAN INDEKS KOTA LAYAK HUNI

### 2.2.1. Teori Kualitas Hidup

Indeks kota layak huni bertumpu pada paradigma **kualitas hidup**, yaitu pengukuran kesejahteraan multidimensi yang bersumber dari:

- kondisi objektif (*objective indicators*) seperti infrastruktur, akses layanan, fasilitas kota
- kondisi subjektif (*subjective well-being*) seperti persepsi keselamatan, kepuasan layanan, kenyamanan lingkungan

### 2.2.2. Teori Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Urban Development*)

Kota layak huni berlandaskan pada konsep keberlanjutan *triple-bottom-line* (*People, Planet, Prosperity*):

1. *People* yakni kesetaraan layanan, keamanan, kesehatan
2. *Planet* yakni lingkungan bersih, tata guna lahan, pengelolaan risiko bencana
3. *Prosperity* yakni ekonomi lokal, akses pekerjaan, keterjangkauan hidup

### 2.2.3. Teori *Urban Services* dan Aksesibilitas

Kelayakan huni dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap Infrastruktur dasar, Transportasi, Ruang public, Fasilitas rekreasi serta Pelayanan kesehatan dan Pendidikan

#### 2.2.4. Teori *Urban Safety dan Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED)

Menurut teori ini dimensi keamanan dan kenyamanan dalam indeks kota layak huni merujuk pada:

- risiko kriminalitas
- keselamatan lalu lintas
- mitigasi bencana
- persepsi rasa aman

Kerangka CPTED (Crowe, 2000) menekankan desain lingkungan yang dapat mencegah kejahatan melalui visibilitas, kontrol akses, dan aktivitas rutin penduduk.

#### 2.2.5. Teori *Urban Governance* dan Responsivitas

Kota layak huni membutuhkan tata kelola kota yang responsif terhadap keluhan warga, transparan, menyediakan kanal komunikasi publik, menerapkan kebijakan berorientasi pelayanan

### 2.3. DIMENSI DAN VARIABEL TEORETIS PEMBENTUK INDEKS KOTA LAYAK HUNI

Berdasarkan sintesis teori global, variabel umum penyusun indeks kota layak huni mencakup:

- a. Keamanan, yang didalamnya memuat tingkat kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, mitigasi risiko bencana dan persepsi rasa aman.
- b. Kesehatan dan lingkungan, yang didalamnya memuat kualitas udara, kebersihan kota, akses ruang hijau, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
- c. Mobilitas, yang didalamnya memuat kualitas jalan perkotaan, ketersediaan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, keterhubungan antar Kawasan.
- d. Ekonomi lokal dan Keterjangkauan hidup, yang didalamnya memuat ketersediaan lapangan kerja, biaya hidup (harga pangan, transportasi, perumahan) dan stabilitas ekonomi lokal.
- e. Layanan Dasar (*Basic Urban Services*), yang didalamnya memuat pendidikan, kesehatan, air bersih, Listrik dan perumahan layak.

- f. Ruang Publik, Rekreasi, dan Budaya, yang didalamnya memuat fasilitas rekreasi berkualitas, ruang terbuka publik yang nyaman, serta akses terhadap fasilitas budaya.
- g. Kelembagaan dan Partisipasi, yang didalamnya memuat kemudahan menyampaikan keluhan, responsivitas pemerintah, keterbukaan informasi serta sistem pengaduan publik berbasis digital.

## **2.4.VARIABEL DAN INDIKATOR**

### **2.4.1.VARIABEL**

Variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diamati, dan diukur sehingga dapat diperoleh informasi guna menarik kesimpulan penelitian. Variabel memiliki nilai yang dapat berubah antar responden atau objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan ditarik kesimpulan. Begitupun Arikunto (2014) mendefinisikan variabel sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian.

Variabel dalam survei kota layak huni kota Bima merupakan karakteristik atau aspek yang ditetapkan peneliti untuk diukur melalui kuesioner dan memiliki variasi nilai antar responden, sehingga dapat dianalisis untuk menggambarkan tingkat kelayakhunian Kota Bima.

Untuk mencapai indeks kota layak huni tersebut variabel yang digunakan diantaranya:

1. Hukum
2. Tata Ruang
3. Lingkungan
4. Sosial Budaya
5. Pelayanan
6. Fasilitas
7. Utilitas



#### 2.4.2. INDIKATOR

Indikator adalah ukuran, tanda, atau ciri-ciri spesifik yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur suatu variabel sehingga variabel tersebut dapat diobservasi secara lebih konkret. Indikator berfungsi sebagai alat untuk mengoperasionalkan variabel yang bersifat abstrak menjadi aspek-aspek yang dapat diukur melalui instrumen penelitian seperti kuesioner.

Indikator merupakan ukuran operasional yang digunakan untuk menjabarkan dan menilai suatu variabel berdasarkan aspek-aspek yang lebih spesifik dan dapat diukur. Indikator membantu peneliti memahami kondisi variabel secara lebih jelas dan memungkinkan dilakukannya pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sugiyono (2019) mendefinisikan indikator sebagai aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat item instrumen penelitian untuk mengukur variabel tertentu. Sedangkan menurut Arikunto (2014) indikator merupakan ciri atau tanda yang menunjukkan kondisi tertentu dari variabel sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses pengukuran.

Indikator dalam survei kota layak huni kota Bima ini merupakan komponen pengukuran yang diturunkan dari setiap variabel untuk memudahkan penilaian secara kuantitatif melalui kuesioner. Indikator digunakan untuk memberikan acuan operasional dalam menentukan kondisi kelayakhunian kota berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk mencapai nilai indeks kota layak huni tersebut indikator yang digunakan dimuat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.1. Indikator Indeks Kota Layak Huni

No.	Variabel	No.	Indikator
1	Hukum	1	Kepatuhan pemerintah kota dalam membangun dan menata kota
		2	Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang
		3	Jaminan rasa aman bagi masyarakat
2	Tata ruang	4	Perencanaan Pembangunan
		5	Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota

No.	Variabel	No.	Indikator
		6	Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota
3	Lingkungan	7	Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan
		8	Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan
		9	Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir
		10	Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas
4	Sosial Budaya	11	Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah
		12	Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal
5	Sosial Ekonomi	13	Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen
		14	Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak
		15	Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif
		16	Komitmen pemerintah kota mengendalikan biaya hidup
6	Pelayanan	17	Ketersediaan media komunikasi mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya
		18	Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga
		19	Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan
7	Fasilitas	20	Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama
		21	Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat
		22	Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan
		23	Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota
		24	Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota
		25	Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota
		26	Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh

No.	Variabel	No.	Indikator
			kota
8	Utilitas	27	Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari
		28	Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat
		29	Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan
		30	Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota

#### 2.4.3. KONSEP DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel dan indikator yang digunakan dalam survei ini, maka diperlukan konsep dan definisi untuk menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan fenomena yang diteliti serta penjelasan ringkas, jelas, dan terukur tentang setiap variabel yang digunakan dalam penelitian agar menyatukan persepsi pengumpul data juga responden. Konsep dan definisi variabel indeks rasa aman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.2. Konsep dan Definisi Variabel Indeks Kota Layak Huni

No	Variabel	Konsep	Definisi
1	Hukum	Hukum	Gambaran kondisi, keberadaan, dan implementasi aturan perundang-undangan, peraturan daerah, maupun kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.
2	Tata ruang	Tata Ruang	Karakteristik yang menggambarkan kondisi, ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dokumen perencanaan ruang lainnya. Variabel ini mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah.
3	Lingkungan	Lingkungan	Kondisi kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, yang mencakup ekosistem darat, air, dan udara dalam suatu wilayah.
4	Sosial budaya	Sosial Budaya	Pelestarian adat, tradisi, bahasa daerah, kesenian, dan peninggalan sejarah

5	Pelayanan	Pelayanan	Kualitas, aksesibilitas, dan ketersediaan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
6	Fasilitas	Fasilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7	Utilitas	Utilitas	Ketersediaan, jangkauan, kualitas, dan pemerataan sarana serta prasarana pendukung kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Utilitas umumnya mencakup layanan dasar berupa listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, drainase, persampahan, sanitasi, gas, dan transportasi.

Tabel. 2.3. Konsep dan Definisi Indikator Indeks Rasa Aman

No	Variabel	No	Indikator	Konsep	Definisi
1	Hukum	1	Kepatuhan pemerintah kota dalam membangun dan menata kota	Pembangunan dan Penataan	wujud pelaksanaan prinsip <i>good spatial governance</i> (tata kelola ruang yang baik), di mana pembangunan kota harus berlandaskan rencana tata ruang yang sah agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial.
		2	Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang	Penegakan Hukum	ukuran sejauh mana aparat pemerintah (baik eksekutif, penegak hukum, maupun aparat pengawasan) melaksanakan penegakan hukum dan peraturan secara tegas, adil, berkesinambungan, dan tanpa pandang bulu di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

		3	Jaminan rasa aman bagi masyarakat	Keamanan	tingkat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan kinerja sistem keamanan kota dalam menciptakan lingkungan yang tertib, stabil, dan bebas dari rasa takut.
2	Tata ruang	4	Perencanaan Pembangunan	Pembangunan	proses sistematis dalam menentukan arah, pola, struktur, dan peruntukan ruang wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
		5	Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota	Tata Kota	tingkat pemenuhan kebutuhan ruang hijau publik yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kota, sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang serta lingkungan hidup.
		6	Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota	Tata Kota	tingkat kelayakan dan kesetaraan penyediaan ruang publik berdasarkan aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, keindahan, dan aksesibilitas yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kota.
3	Lingkungan	7	Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan	Kebersihan	tingkat kepedulian dan tindakan nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan tertata, melalui kebijakan, program, sarana prasarana, serta keterlibatan masyarakat.



		8	Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan	Kebersihan	tingkat keseriusan dan tindakan nyata pemerintah daerah dalam upaya mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui kebijakan, program, pengawasan, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
		9	Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir	Penanganan Banjir	tingkat keberlanjutan dan keteguhan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan banjir secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, baik dalam upaya pencegahan, penanganan darurat, maupun pemulihan pasca-banjir.
		10	Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas	Lalu Lintas	tingkat kepedulian, komitmen, dan tindakan nyata pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan
4	Sosial Budaya	11	Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah	Bangunan Bersejarah	upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota untuk mengidentifikasi, melestarikan, merawat, dan memanfaatkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya, agar tetap terjaga kelestariannya dan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan kota.

		12	Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal	Budaya Lokal	tingkat upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk melindungi, melestarikan, serta mengembangkan potensi budaya lokal melalui program, regulasi, pendanaan, dan dukungan kelembagaan, sehingga budaya lokal tetap terpelihara dan menjadi bagian dari pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
5	Sosial Ekonomi	13	Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen	Ekonomi	upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, baik melalui kebijakan, program, maupun tindakan langsung, untuk menertibkan, melindungi, serta memberdayakan pengemis, gelandangan, dan pengamen melalui pendekatan sosial, hukum, dan kemanusiaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi keberadaan mereka di ruang publik
		14	Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan kehidupan yang layak	Ekonomi	upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang produktif, penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar, serta akses terhadap perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
		15	Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif	Lapangan Kerja	tingkat ketersediaan dan aksesibilitas peluang kerja di wilayah kota yang dapat menyerap tenaga kerja usia produktif, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan potensi ekonomi daerah.

		16	Komitmen pemerintah kota mengendalikan biaya hidup	Biaya Hidup	tingkat kesungguhan dan efektivitas upaya pemerintah kota dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, tarif layanan publik, serta biaya hunian dan transportasi, melalui kebijakan, pengawasan, dan intervensi ekonomi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
6	Pelayanan	17	Ketersediaan media komunikasi mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya	Media Komunikasi	ketersediaan berbagai saluran komunikasi resmi yang disediakan pemerintah kota—baik secara langsung maupun digital—yang dapat digunakan masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau permintaan layanan.
		18	Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga	Cepat Tanggap Keluhan	ukuran waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah kota atau instansi terkait untuk memberikan tanggapan awal dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh warga melalui berbagai saluran pengaduan resmi maupun nonresmi
		19	Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan	Petunjuk/Informasi Kota	keberadaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sarana informasi publik di lingkungan kota seperti papan petunjuk arah, papan nama jalan, rambu informasi, peta kota, papan informasi transportasi, serta papan petunjuk fasilitas umum yang berfungsi membantu masyarakat dan pengunjung dalam mengenali lokasi, arah, dan layanan yang tersedia di wilayah kota.

7	Fasilitas	20	Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama	Angkutan Umum	ketersediaan layanan transportasi publik di wilayah kota yang mencakup seluruh area permukiman dan pusat aktivitas, dengan standar pelayanan yang memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, ketepatan waktu, dan frekuensi kedatangan yang memadai.
		21	Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat	Fasilitas Jalan	tingkat persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kondisi fisik, dan kelayakan penggunaan jalan di berbagai tingkatan (jalan utama, jalan penghubung, dan jalan lingkungan) di Kota Bima
		22	Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan	Fasilitas pejalan kaki	tingkat persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kondisi fisik, kenyamanan, keamanan, dan keterhubungan jalur pejalan kaki (trotoar, zebra cross, jalur difabel, dan penerangan jalan) yang disediakan oleh Pemerintah Kota
		23	Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota	Fasilitas Kesehatan	ketersediaan dan pemerataan sarana pelayanan kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan posyandu) yang memiliki mutu layanan memadai, kondisi fisik dan kenyamanan yang baik, serta kemudahan akses bagi seluruh warga kota tanpa diskriminasi wilayah atau sosial ekonomi.

		24	Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota	Fasilitas Pendidikan	lembaga pendidikan formal (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) dan nonformal yang memenuhi standar kualitas layanan, tersebar secara merata di setiap wilayah, memiliki sarana-prasarana yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta dapat dijangkau oleh seluruh penduduk kota baik dari sisi jarak maupun biaya
		25	Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota	Fasilitas Rekreasi	tingkat persepsi masyarakat terhadap jumlah, sebaran, dan mutu fasilitas rekreasi yang dapat diakses dengan mudah oleh warga di berbagai wilayah Kota Bima. Ruang publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk kegiatan bersantai, berolahraga, berinteraksi, dan menikmati lingkungan kota.
		26	Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota	Fasilitas kaum Difabel	tingkat ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sarana-prasarana publik yang dirancang sesuai standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti jalur kursi roda, guiding block, ramp, toilet khusus difabel, tempat parkir khusus, serta kemudahan akses di transportasi umum dan bangunan publik.
8	Utilitas	27	Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari	Energi Listrik dan Telekomunikasi	kecukupan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pasokan energi listrik serta jaringan telekomunikasi (telepon, internet, dan data) yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kota



		28	Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat	Persampahan	keseluruhan proses dan mekanisme penanganan sampah rumah tangga maupun non-rumah tangga yang dilaksanakan secara teratur, terintegrasi, dan berkelanjutan mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, estetika kota, serta perlindungan lingkungan
		29	Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkelanjutan	Air Bersih	ketersediaan dan keterjangkauan air bersih yang memenuhi standar kualitas kesehatan, dengan suplai yang kontinu dan tekanan air yang memadai untuk kebutuhan harian masyarakat di seluruh wilayah kota.
		30	Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota	Sanitasi	gambaran sejauh mana pemerintah kota menyediakan dan mengelola sistem sanitasi yang aman, layak, dan inklusif bagi seluruh warga, meliputi pengelolaan air limbah domestik, toilet/ jamban sehat, serta sistem pembuangan dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan

## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1. METODE PENGAMBILAN SAMPEL

##### 3.1.1. POPULASI

Populasi dalam Survei Kota Layak Huni Kota Bima adalah seluruh penduduk Kota Bima yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah dianggap dewasa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Populasi ini dipilih karena kelompok usia tersebut dianggap sudah memiliki kemampuan berpikir rasional dan pengalaman langsung dalam menilai kondisi kelayakhunian serta rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Minimal usia populasi 17 tahun dipertimbangkan mengikuti PKPU No. 7 tahun 2022 pasal 1 ayat 19 yang menetapkan syarat minimal umur menjadi pemilih berusia 17 tahun, yang menggambarkan bahwa yang bersangkutan sudah dianggap dewasa secara politik. Meskipun menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkannya sebagai pemuda atau dewasa muda dalam kategori remaja (10–19 tahun) atau dewasa (18–65 tahun), sedangkan menurut Departemen Kesehatan (Depkes) RI yang menggolongkannya sebagai masa remaja akhir (17–25 tahun).

Daftar populasi yang digunakan dalam survei ini berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bima berusia 17 tahun ke atas, yang diperoleh dari hasil pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dari KPU, yakni sebanyak 114.351 orang yang tersebar di 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan.

##### 3.1.2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Namun sepanjang sejarah penelitian, belum pernah ada sampel yang bisa mewakili 100% karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam setiap penarikan sampel senantiasa melekat sebuah kesalahan, yang dikenal dengan nama “*Sampling Error*” atau “*Margin of Error*”. *Margin of Error* didefinisikan sebagai selisih antara nilai statistik hasil pengukuran terhadap unit-unit dalam sampel dengan nilai parameter populasinya. *Margin of Error* dinyatakan dalam bentuk persentase (%) yang dapat pula diartikan sebagai

persentase tingkat kesalahan pendugaan parameter populasi yang masih bisa ditoleransi.

*Margin of Error* berkaitan erat dengan banyaknya jumlah sampel yang akan disurvei, semakin banyak jumlah sampel yang diambil, umumnya akan semakin merepresentasikan karakteristik populasinya dan hasil survei lebih dapat digeneralisasikan.

Pertanyaan yang seringkali muncul pada proses pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

n : Jumlah/ukuran sampel

N: Jumlah/Ukuran populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*margin of error*) yang diinginkan

Perhitungan sampel untuk survei ini menggunakan batas toleransi kesalahan (*Margin of Error*) sebesar 2,5%. *Margin of Error* ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil *Margin of Error*, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan *Margin Error* 2,5% berarti memiliki tingkat kepercayaan 97,5%. Penelitian dengan *Margin Error* 5% memiliki tingkat kepercayaan 95%.

Dengan menggunakan *margin of error* sebesar 2,5% serta jumlah populasi sebanyak 114.351 orang, maka dengan tingkat kepercayaan 97,5% jumlah responden yang akan menjadi responden untuk mengisi survei adalah sebanyak 1.577 orang.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *Simple Random Sampling* (pengambilan sampel acak sederhana) hingga diperoleh daftar sampel utama, cadangan dan tambahan. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi

setiap individu dalam populasi untuk terpilih sebagai responden, tanpa memperhatikan lokasi, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang sosial ekonomi.

Dengan metode ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi bagian dari sampel, sehingga hasil survei dapat menggambarkan kondisi secara umum dan mengurangi potensi bias dalam pemilihan responden.

### **3.2. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data dalam Survei Indeks Kota Layak Huni Kota Bima dilakukan untuk memperoleh data primer yang menggambarkan kondisi, pengalaman, serta persepsi masyarakat terkait keamanan lingkungan, kriminalitas, ketertiban umum, dan kesiapsiagaan bencana. Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner.

Kuesioner yaitu instrumen yang berisi pertanyaan terstruktur untuk mengukur persepsi dan tingkat rasa aman masyarakat Kota Bima. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert (5 poin) untuk memudahkan responden memilih tingkat persetujuan atau persepsi mereka terhadap pernyataan yang diajukan. Dengan Pilihan skala:

1. Sangat Buruk
2. Buruk
3. Cukup
4. Baik
5. Sangat Baik

Skala ini memudahkan analisis kuantitatif dalam penentuan indeks.

Kuesioner terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

1. Identitas responden yang memuat informasi dasar seperti nama, alamat, jenis kelamin, usia, sektor pekerjaan, dan lama domisili.
2. Pertanyaan inti terkait variabel Indeks Kota Layak Huni, meliputi:
  - Kinerja Pemerintah Kota Bima dalam membangun dan menata kota
  - Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang
  - Jaminan rasa aman bagi Masyarakat
  - Perencanaan Pembangunan

- Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota
- Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota
- Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan
- Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan
- Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir
- Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas
- Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah
- Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal
- Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen
- Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak
- Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif
- Komitmen pemerintah kota mengendalikan biaya hidup
- Ketersediaan media komunikasi mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya
- Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga
- Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan
- Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama
- Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat
- Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan
- Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota
- Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota
- Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota

- Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota
- Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari
- Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat
- Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan
- Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota

Kuesioner disebarkan dengan Kuesioner Cetak (*Offline*) yang diberikan langsung kepada warga yang masuk ke dalam daftar sampel di seluruh kelurahan di Kota Bima oleh tim pendata untuk mendapatkan representasi wilayah.

Untuk memastikan kualitas data yang telah dikumpulkan oleh tim pendata, kuesioner diuji melalui:

- a. Uji Validitas menggunakan korelasi *Pearson* untuk melihat ketepatan instrumen dalam mengukur indikator variabel.
- b. Uji Reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk memastikan konsistensi jawaban responden. Instrumen dinyatakan layak digunakan jika  $\text{Alpha} > 0.70$ .

### 3.3. PENYUSUNAN KUESIONER

Untuk mendapatkan nilai indeks kota layak huni Kota Bima disusunlah pertanyaan- pertanyaan tertutup dengan menggunakan kuesioner sesuai dengan konsep dan definisi dari masing-masing indikator penyusun nilai indeks kota layak huni sesuai tabel 2.3. Kuesioner tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 3.1. Kuesioner Survei Kota Layak Huni Kota Bima



PEMERINTAH KOTA BIMA  
SURVEI KOTA LAYAK HUNI DAN RASA AMAN  
TAHUN 2025

BLOK I KETERANGAN RESPONDEN			
101	Kecamatan	<input type="text"/>	
102	Kelurahan	<input type="text"/>	
103	No Urut Responden	<input type="text"/>	
104	Alamat	<input type="text"/>	
105	Nama Responden	<input type="text"/>	
106	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan
107	Usia	<input type="text"/>	
108	Pendidikan Terakhir	1. Tidak Sekolah    5.D1/D2/D3 2. SD/Sederajat    6. S1/D4 3. SMP/Sederajat    7. S2 4. SMA/Sederajat    8. S3	
109	Apakah satu bulan terakhir bekerja (Kode 2 -->111)	1. Ya    2. Tidak	
110	Pekerjaan (tuliskan detail pekerjaan) *kode lapangan usaha di halaman terakhir	<input type="text"/>	
111	No HP	<input type="text"/>	
112	Lama Berdomisili	<input type="text"/>	

BLOK II KETERANGAN PENDATAAN			
Urutan	Nama	Tanggal	Tanda tangan
201	Pendata		
202	Pemeriksa		

BLOK III RINGKASAN	
Blok IV Keterangan Kota Layak Huni	Jumlah
a. Jumlah Jawaban Kode 1	
b. Jumlah Jawaban Kode 2	
c. Jumlah Jawaban Kode 3	
d. Jumlah Jawaban Kode 4	
e. Jumlah Jawaban Kode 5	
Blok V Keterangan Rasa Aman	Jumlah
a. Jumlah Jawaban Kode 1	
b. Jumlah Jawaban Kode 2	
c. Jumlah Jawaban Kode 3	
d. Jumlah Jawaban Kode 4	
e. Jumlah Jawaban Kode 5	

BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI	
Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)	Jawaban (lingkari) 1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4. Baik 5. Sangat Baik
401 Menurut pendapat saudara seberapa baik Pemerintah Kota Bima dalam membangun dan menata kota (contoh: Penertiban bangunan liar di sempadan sungai dan bahu jalan, Peningkatan dan pelebaran jalan perkotaan, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
402 Menurut pendapat saudara seberapa baik konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang (contoh: Satpol PP Kota Bima secara rutin melakukan razia pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau area terlarang, razia petasan, minuman keras, dan tempat hiburan)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
403 Menurut pendapat saudara seberapa baik jaminan rasa aman bagi masyarakat di Kota Bima (contoh: penambahan CCTV, lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan utama, permukiman, dan jalur rawan kriminalitas)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
404 Menurut pendapat saudara seberapa baik perencanaan pembangunan di Kota Bima (contoh: penyampaian rencana pembangunan kota saat mbala waki atau musrembang di kelurahan/kecamatan)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
405 Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh Kota Bima (contoh : Taman Amahami, Taman Kado, Taman Ria, Lapangan Serasuba, Lapangan PU, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
406 Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota	1 - 2 - 3 - 4 - 5
407 Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap kebersihan kota dan lingkungan (contoh: penambahan armada pengangkutan sampah, Kegiatan rutin penyiiran tanaman dan pemangkasan pohon)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
408 Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap penanganan pencemaran lingkungan (contoh: pemasangan spanduk dan papan larangan membuang sampah ke sungai di sejumlah titik)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
409 Menurut pendapat saudara seberapa baik konsistensi Pemerintah Kota Bima dalam menangani banjir (contoh: penguatan sedimen saluran drainase/sungai, perbaikan gorong-gorong, serta pembuatan saluran drainase baru)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
410 Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap penanganan kemacetan lalu lintas (contoh: saat menjelang hari raya di pasar lama, pasar amahami, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
411 Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam hal perlindungan bangunan bersejarah (contoh : menjaga Istana Kesultanan Bima (Asi Mbaja) sebagai cagar budaya utama dan pusat sejarah daerah)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
412 Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal (contoh: Festival Rimpu Mantika, biola gambo, dan budaya tenun)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
413 Menurut pendapat saudara seberapa baik penanganan Pemerintah Kota Bima terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen (contoh: Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban di tempat-tempat umum seperti penempatan jalan, pasar, terminal, dan area wisata)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
414 Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menyediakan penghidupan yang layak (contoh: Pelatihan/pembinaan UMKM, Bantuan modal usaha dan alat produksi bagi pelaku UMKM)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
415 Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif (contoh: adanya kegiatan Jobfair, penyerapan formasi ASN, PPPK, dan tenaga kontrak daerah)	1 - 2 - 3 - 4 - 5

*Lanjutan Gambar. 3.1. Kuesioner Survei Kota Layak Huni Kota Bima*

BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI (LANJUTAN)		
Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik
416	Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima mengendalikan biaya hidup (contohnya: operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
417	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan media komunikasi yang mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya (contohnya: media sosial Pemerintah, E-lapor, Sanihu, Spdn-Lapor, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
418	Menurut pendapat saudara seberapa baik tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga	1 - 2 - 3 - 4 - 5
419	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas petunjuk/informasi perkotaan (contohnya: papan petunjuk arah, papan nama jalan, rambu informasi, peta kota)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
420	Menurut pendapat saudara seberapa baik angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama (contohnya: Bemo, Ojek Pangkalan, Ojek Online (gojek/grab), dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
421	Menurut pendapat saudara seberapa baik kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat	1 - 2 - 3 - 4 - 5
422	Menurut pendapat saudara seberapa baik kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan (contohnya: zebracross, trotoar, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
423	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
424	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
425	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
426	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
427	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari	1 - 2 - 3 - 4 - 5
428	Menurut pendapat saudara seberapa baik sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat	1 - 2 - 3 - 4 - 5
428.a	Apakah saudara melakukan pemisahan/pemilahan sampah sebelum di buang? (seperti pemilahan Sampah Organik dan NonOrganik)	1. Ya 2. Tidak
428.b	Bagaimana Saudara Mengelola Sampah ?	1. Dibakar 2. Membuang Sendiri ke TPS Terdekat 3. Sampah Langsung diangkut Petugas 4. Buang ke Sungai 5. Lainnya .....

BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI (LANJUTAN)		
Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik
429	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan	1 - 2 - 3 - 4 - 5
429.a	Sumber Air untuk Kebutuhan sehari-hari selain Air Minum	1. Air Kemasan Bermerek 2. Air Isi Ulang 3. Leding/PDAM 4. Sumur Bor/Pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung 7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air Permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya
429.b	Sumber Air untuk Kebutuhan Air Minum	1. Air Kemasan Bermerek 2. Air Isi Ulang 3. Leding/PDAM 4. Sumur Bor/Pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung 7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air Permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya
430	Menurut pendapat saudara seberapa baik Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh Kota Bima (contohnya: toilet/ jamban sehat, saluran drainase)	1 - 2 - 3 - 4 - 5

### 3.4. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil survei ini dilakukan mengikuti Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setiap indikator dinilai menggunakan skala likert 5 poin, yakni sangat buruk, buruk, cukup, baik dan sangat baik.

#### 3.4.1. Pengukuran Skala Likert

Setiap responden memberikan penilaian terhadap indikator penyusun indeks kota layak huni dengan skala:

- o Sangat Buruk



- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

#### 3.4.2. Perhitungan Nilai Persepsi

Nilai Persepsi (NP) dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor responden pada setiap indikator kemudian dibagi jumlah responden.

$$NP = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

#### 3.4.3. Konversi Nilai Persepsi ke Nilai Indeks / Nilai Interval (NI)

Selanjutnya NP dikonversi ke skala 20–100 dengan mengalikan nilai dasar 20, sebagaimana ketentuan IKM di PermenPANRB No. 14/2017.

$$NI = NP \times 20$$

#### 3.4.4. Perhitungan Indeks Kota Layak Huni (IKLH)

Nilai indeks tiap indikator dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai IKM total yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap variabel Kota Layak Huni.

Jika terdapat beberapa indikator, maka nilai indeks dihitung dari rerata seluruh nilai interval indikator.

$$IKLH = \frac{\sum NI}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Tabel 3.1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi (NP)	Rentang NP	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
5	4,40 – 5,00	88,00 – 100	88,00 – 100	A	Sangat Baik
4	3,80 – 4,39	76,00 – 87,80	76,00 – 87,99	B	Baik
3	3,25 – 3,79	65,00 – 75,80	65,00 – 75,99	C	Cukup
2	2,50 – 3,24	50,00 – 64,80	50,00 – 64,99	D	Kurang
1	1,00 – 2,49	20,00 – 49,80	20,00 – 49,99	E	Sangat Kurang

Secara sistematis tahapan pengolahan data hasil survei indeks kota layak huni kota bima 2025 sebagai berikut :

1. *Editing* data, memeriksa kelengkapan kuesioner.
2. *Coding* data, memberi kode angka pada kode wilayah, dan sektor pekerjaan.
3. *Entry* data, memasukkan data ke perangkat lunak (Excel).
4. *Cleaning* data, menghapus data ganda/tidak valid.
5. *Scoring*/pengolahan, menghitung NP, NI, dan Indeks akhir.
6. Analisis dan interpretasi hasil, menentukan mutu dan kinerja sesuai PermenPANRB.

### 3.5. PENGUJIAN KUESIONER

Pengujian kuesioner dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu valid dan reliabel.

#### 3.5.1. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dengan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1	0,493	0,051	Valid
X.2	0,446	0,051	Valid
X.3	0,492	0,051	Valid
X.4	0,486	0,051	Valid
X.5	0,528	0,051	Valid
X.2	0,543	0,051	Valid
X.6	0,526	0,051	Valid
X.7	0,543	0,051	Valid
X.8	0,535	0,051	Valid
X.9	0,190	0,051	Valid

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X.11	0,500	0,051	Valid
X.12	0,367	0,051	Valid
X.13	0,463	0,051	Valid
X.14	0,410	0,051	Valid
X.15	0,520	0,051	Valid
X.16	0,536	0,051	Valid
X.17	0,535	0,051	Valid
X.18	0,496	0,051	Valid
X.19	0,516	0,051	Valid
X.20	0,376	0,051	Valid
X.21	0,519	0,051	Valid
X.22	0,549	0,051	Valid
X.23	0,523	0,051	Valid
X.24	0,525	0,051	Valid
X.25	0,515	0,051	Valid
X.26	0,516	0,051	Valid
X.27	0,323	0,051	Valid
X.28	0,442	0,051	Valid
X.29	0,261	0,051	Valid
X.30	0,390	0,051	Valid

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 3.2, Jika hasil perhitungan dari masing-masing variabel menghasilkan r hitung lebih besar daripada r tabel maka dapat dikatakan data yang didapat valid, sedangkan bila r hitung lebih kecil daripada r tabel maka data yang didapat tidak valid. Nilai r tabel didapatkan dari Rumus r tabel adalah  $df = N-2$  jadi  $1577-2 = 1575$ , sehingga  $r \text{ tabel} = 0,051$ . Dimana pada penelitian ini menggunakan sebanyak 30 variabel dengan 1577 responden.

Berdasarkan tabel 3.2 didapatkan bahwa dari semua variabel didapatkan hasil  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel sehingga untuk semua variabel dinyatakan valid.

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan yaitu proses pengukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan serta menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat yang sama (Widi E., 2011).

Gambar.3.2. Tampilan Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.877	.878	30

Berdasarkan hasil dari gambar di atas didapatkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* 0,877 dengan 30 item. Dimana uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, dianggap reliabel bila koefisien alphanya  $> 0,70$  (Sugiarto, 2017). Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha*  $> 0,7$  sehingga indikator dari setiap variabel tersebut dinyatakan reliabel.

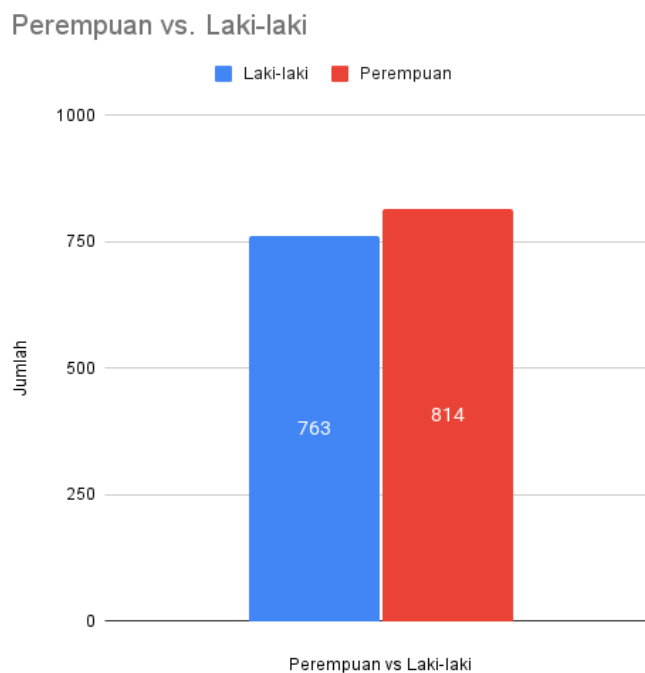
## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. GAMBARAN UMUM RESPONDEN

#### 4.1.1. JENIS KELAMIN

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 783 responden laki-laki dan 814 responden Perempuan, Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut :

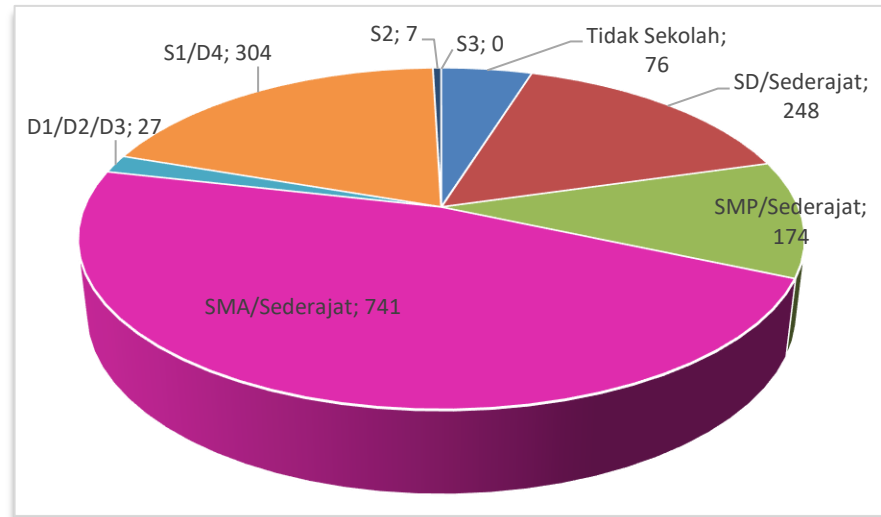
Grafik. 4.1. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin



#### 4.1.2. JENJANG PENDIDIKAN

Berdasarkan jenjang Pendidikan 1.577 responden terbagi menjadi beberapa kelompok yakni sebanyak 76 orang Tidak Sekolah, 248 orang Tamatan SD/ sederajat, 174 orang Tamatan SMP/ sederajat, 741 orang Tamatan SMA/ sederajat, 304 orang Tamatan S1/D4, 27 orang Tamatan D1/D2/D3, dan 7 orang lulusan S2.

Grafik. 4.2. Klasifikasi responden berdasarkan Pendidikan



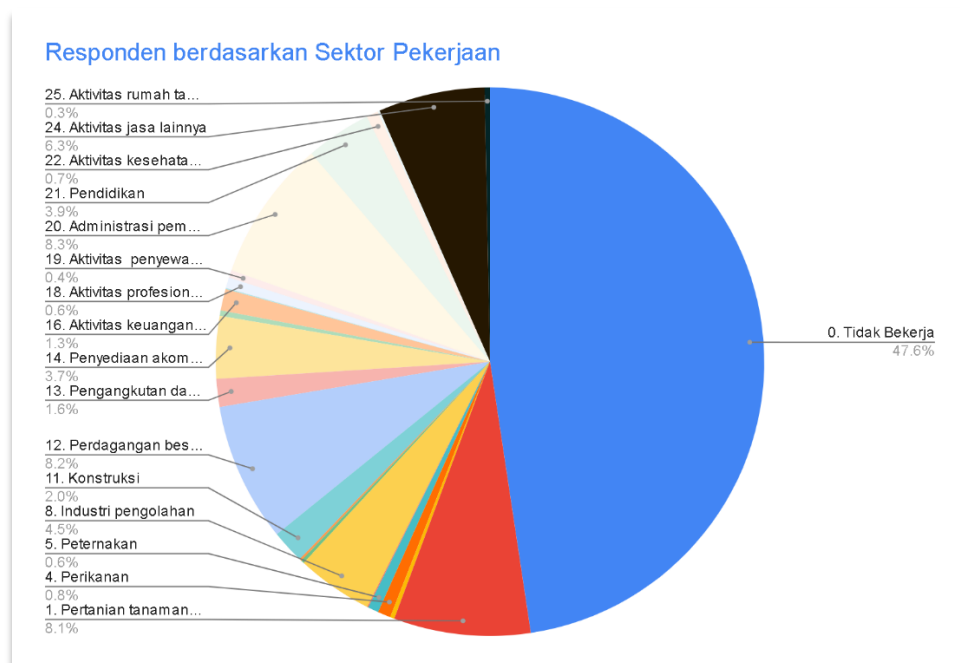
Tingkat pendidikan responden bervariasi, memungkinkan pembacaan persepsi dari berbagai lapisan masyarakat,

#### 4.1.3. SEKTOR PEKERJAAN

Sektor pekerjaan responden sangat bervariasi, dari 1.577 responden yang tersebar di 41 kelurahan se Kota Bima, responden yang tidak bekerja sebanyak 751 orang, yang bertani tanaman padi dan palawija sebanyak 127 orang, disektor hortikultura sebanyak 4 orang, di sektor perikanan 12 orang, yang terlibat di sektor peternakan 10 orang. Sektor industri pengolahan sebanyak 71 orang didominasi oleh penun kain (ntembe nggoli) khas Bima, sektor Pertambangan dan penggalian sebanyak 1 orang, sektor Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebanyak 2 orang, sektor Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah, aktiviats remediasi sebanyak 2 orang, sektor konstruksi sebanyak 31 orang, yang terlibat di sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 129 orang, sektor Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 58 orang, yang bekerja di sektor pengangkutan dan pergudangan sebanyak 26 orang, yang bekerja di sektor Informasi dan komunikasi sebanyak 5 orang. Aktivitas keuangan dan asuransi sebanyak 20 orang, sedangkan sektor real estate 1 orang. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis sebanyak 10 orang, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya

sebanyak 7 orang, ASN (Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial) sebanyak 131 orang, guru dan tenaga pendidik yang masuk ke dalam sektor pendidikan sebanyak 61 orang. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebanyak 11 orang. Sektor Kesenian, hiburan, dan rekreasi 2 orang, asisten rumah tangga sektor Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja sebanyak 5 orang, serta aktivitas jasa lainnya sebanyak 99 orang yang didominasi oleh Ojek.

Grafik. 4.3. Klasifikasi responden berdasarkan Sektor Pekerjaan



#### 4.1.4. LAMA TINGGAL

Lama tinggal sebagian besar responden lebih dari lima tahun, dengan rata-rata lama tinggal yakni 37 tahun, sehingga persepsi responden cukup mewakili pengalaman tinggal di Kota Bima.

#### 4.2. ANALISIS DATA

Pada Survei Indeks Kota Layak Huni Kota Bima tahun 2025 yang dilakukan pada 1.577 responden di 41 Kelurahan, Nilai IKLH yang diperoleh dari hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1. Hasil Pengolahan Data

Indikator	Jumlah Nilai	Nilai rata-rata	Indeks Kepuasan Per Unsur	Keterangan Nilai
Kinerja Pemerintah Kota Bima dalam membangun dan menata kota	5.903	3,74	74,86	Cukup
Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang	5.754	3,65	72,97	Cukup
Jaminan rasa aman bagi Masyarakat	5.923	3,76	75,12	Cukup
Perencanaan Pembangunan	6.082	3,86	77,13	Baik
Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota	5.834	3,70	73,99	Cukup
Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota	5.604	3,55	71,07	Cukup
Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan	5.891	3,74	74,71	Cukup
Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan	5.613	3,56	71,19	Cukup
Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir	5.726	3,63	72,62	Cukup
Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas	6.170	3,91	78,25	Baik
Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah	6.055	3,84	76,79	Baik
Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal	6.656	4,22	84,41	Baik
Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen	5.021	3,18	63,68	Kurang
Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak	5.264	3,34	66,76	Cukup





<b>Indikator</b>	<b>Jumlah Nilai</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>Indeks Kepuasan Per Unsur</b>	<b>Keterangan Nilai</b>
Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif	5.105	3,24	64,74	Kurang
Komitmen pemerintah kota mengendalikan biaya hidup	5.681	3,60	72,05	Cukup
Ketersediaan media komunikasi mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya	5.793	3,67	73,47	Cukup
Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga	5.714	3,62	72,47	Cukup
Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan	5.620	3,56	71,27	Cukup
Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama	5.866	3,72	74,39	Cukup
Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat	5.618	3,56	71,25	Cukup
Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan	5.344	3,39	67,77	Cukup
Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota	6.414	4,07	81,34	Baik
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota	6.449	4,09	81,79	Baik
Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota	5.902	3,74	74,85	Cukup
Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota	4.793	3,04	60,79	Kurang
Ketersediaan energi	6.586	4,18	83,53	Baik

Indikator	Jumlah Nilai	Nilai rata-rata	Indeks Kepuasan Per Unsur	Keterangan Nilai
listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari				
Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat	5.608	3,56	71,12	Cukup
Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan	5.983	3,79	75,88	Cukup
Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota	5.878	3,73	74,55	Cukup

Pada indikator Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel sebagian besar responden dengan persentase sebesar 66,65% menyatakan kurangnya perhatiannya Pemerintah Kota terhadap penyediaan fasilitas untuk kaum difabel di lingkungan tempat tinggal mereka terutama di ruang publik, indikator ini menjadi indikator terendah yang menyumbang rerata nilai IKLH.

Indikator Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen menjadi indikator terendah kedua dengan persentase sebanyak 59,09% responden menyatakan kurang. Nilai ini mengindikasikan masyarakat menilai bahwa penanganan yang dilakukan belum optimal memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah pengemis, gelandangan, atau pengamen karena mereka masih sering melihat pengemis, gelandangan, dan pengamen di jalan raya, pusat perdagangan, lampu merah, dan fasilitas umum lain, sehingga menurunkan penilaian.

Indikator Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak adalah indikator terendah ketiga dengan persentase sebanyak 53,71% responden menyatakan kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum merasakan secara optimal upaya pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan sumber penghidupan yang layak serta peningkatan efektivitas pelatihan keterampilan dan dukungan usaha produktif bagi masyarakat.

Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal menjadi indikator dengan nilai rerata tertinggi. Artinya masyarakat sangat

mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pelestarian budaya lokal. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Festival Rimpu Mantika setiap tahun dianggap berdampak nyata, konsisten, dan memberikan dampak positif pada identitas budaya daerah.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh **Indeks Kota Layak Huni** Kota Bima tahun 2025 sebesar **73,49** masuk kedalam kategori **Cukup**. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kelayakhunian Kota Bima telah berada pada tingkat yang relatif memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari aspek infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, keamanan, maupun kenyamanan bermukim. Meskipun demikian, nilai tersebut juga mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan pada beberapa aspek strategis, khususnya dalam pemerataan kualitas layanan, peningkatan aksesibilitas, penguatan kualitas lingkungan perkotaan, serta peningkatan peluang ekonomi dan lapangan kerja. Dengan posisi indeks pada kategori “Cukup”, Pemerintah Kota Bima memiliki peluang besar untuk melakukan penguatan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kategori “**Cukup**” menunjukkan bahwa Kota Bima telah memenuhi sebagian besar aspek dasar kelayakhunian, namun kualitasnya masih berada pada tingkat menengah dan belum mencapai kondisi ideal. Nilai ini menggambarkan bahwa kota telah memiliki fondasi yang relatif memadai dalam mendukung kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, seperti tersedianya layanan publik dasar, infrastruktur yang berfungsi secara umum, serta lingkungan sosial yang cukup kondusif. Namun demikian, capaian ini juga menandakan adanya sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kualitas dan pemerataan fasilitas kota, ketersediaan ruang publik dan ruang hijau, aksesibilitas layanan sosial, serta peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara luas,

Kategori “Cukup” mengindikasikan bahwa Kota Bima sedang berada pada tahap transisi menuju kota yang lebih layak huni, di mana berbagai inisiatif pembangunan telah berjalan namun belum mencapai tingkat yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas layanan yang diberikan, termasuk dalam hal penataan kawasan perkotaan, kualitas lingkungan, dan penguatan

ketahanan terhadap risiko bencana alam maupun sosial. Oleh karena itu, nilai ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga pada periode mendatang Kota Bima dapat bergerak menuju kategori “Baik” dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan,

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kinerja relatif rendah. Indikator-indikator tersebut meliputi ketersediaan fasilitas bagi kaum difabel dan merata di seluruh kota, penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen, komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak, ketersediaan media komunikasi yang mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhan, ketersediaan fasilitas petunjuk dan informasi perkotaan, kualitas fasilitas pejalan kaki serta konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan di berbagai bidang yang masih dinilai kurang optimal oleh masyarakat.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bima memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas dan pelayanan publik, antara lain melalui peningkatan dan standardisasi fasilitas ramah difabel di ruang publik dan fasilitas umum, penguatan fungsi pengawasan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur dalam penegakan peraturan daerah, pengembangan program penanganan terpadu bagi pengemis, gelandangan, dan pengamen yang mengedepankan pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan komitmen penyediaan lapangan kerja dan akses penghidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan dan mengoptimalkan media komunikasi publik yang mudah diakses, seperti layanan pengaduan berbasis digital dan kanal layanan terpadu, memperbanyak dan memperjelas fasilitas petunjuk maupun informasi perkotaan, serta meningkatkan kualitas trotoar dan jalur pedestrian agar lebih aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelayakhunian Kota Bima secara berkelanjutan dan mendorong peningkatan nilai IKLH pada tahun-tahun berikutnya.

Pembahasan hasil survei Indeks Kota Layak Huni (IKLH) Kota Bima tahun 2025 ini juga menganalisis capaian indeks pada lima kecamatan yang menjadi wilayah administrasi Kota Bima, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Raba, Mpunda, dan Asakota. Analisis per kecamatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kelayakhunian secara lebih spesifik, melihat kesenjangan antarwilayah, serta menentukan prioritas pembangunan yang paling tepat berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan,

#### 4.2.1. Kecamatan Rasanae Barat

Kecamatan Rasanae Barat menunjukkan capaian indeks yang cukup baik senilai 73,19. Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, kesehatan relatif lebih memadai. Namun beberapa indikator seperti kelancaran drainase, pengelolaan sampah, ketersediaan ruang terbuka hijau serta penyediaan fasilitas air bersih masih memerlukan peningkatan. Warga menilai aspek keamanan dan kenyamanan kawasan permukiman termasuk cukup buruk, karena banyaknya pengedaran narkoba dan miras sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.

#### 4.2.2. Kecamatan Rasanae Timur

Rasanae Timur memiliki nilai indeks yang cenderung berada pada kategori cukup senilai 73,18 hampir sama dengan Rasanae Barat. Hal ini disebabkan oleh kepadatan permukiman yang tinggi dan distribusi fasilitas umum seperti kualitas jalan lingkungan dan fasilitas pejalan kaki yang belum merata. Permasalahan utama di kecamatan ini adalah kesempatan kerja, pengelolaan sampah dan akses drainase yang mendapatkan penilaian rendah dari responden.

#### 4.2.3. Kecamatan Raba

Kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan wilayah yang cukup luas dan heterogen, sehingga variasi nilai indeks antar kelurahan cukup besar. Secara keseluruhan, nilai IKLH Kecamatan Raba berada pada kategori cukup yakni 73,02. Kelebihan utama adalah aksesibilitas menuju pusat kota dan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, beberapa kelurahan menghadapi masalah drainase, rawan banjir,

dan keterbatasan fasilitas rekreasi. Kepuasan warga terhadap keamanan dan ketertiban juga bervariasi, mengikuti kondisi sosial masing-masing wilayah.

#### 4.2.4. Kecamatan Mpunda

Mpunda menunjukkan nilai indeks yang relatif tinggi dibanding kecamatan lain yakni sebesar 74,69. Ketersediaan ruang publik, fasilitas kesehatan, layanan administrasi pemerintah, serta jaringan jalan yang dinilai berada dalam kondisi baik dan relatif memadai oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mpunda memiliki akses layanan dasar yang lebih baik dan infrastruktur yang relatif lebih siap dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan dan infrastruktur yang telah ada, sekaligus mendorong peningkatan pada aspek-aspek lain yang masih memerlukan perhatian agar tingkat kelayakhunian dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

#### 4.2.5. Kecamatan Asakota

Asakota yang diperkirakan akan memperoleh nilai indeks yang cenderung lebih rendah dibanding kecamatan lainnya, dikarenakan kondisi geografis yang sebagian merupakan daerah pesisir menyebabkan beberapa indikator lingkungan seperti kebersihan pantai, risiko bencana rob, ternyata mendapatkan nilai indeks yang hampir mendekati nilai indeks Kecamatan Mpunda yang merupakan wilayah pusat kota, yakni sebesar 73,39. Akan tetapi pengelolaan sampah, aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan dirasa oleh masyarakat masih kurang optimal. Meski begitu, nilai solidaritas sosial warga serta keamanan lingkungan mendapatkan penilaian cukup baik.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai Indeks Kota Layak Huni Kota Bima tahun 2025 sebesar 73,78 berada pada kategori Cukup. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum Kota Bima telah mampu menyediakan lingkungan perkotaan yang relatif layak bagi masyarakat, ditinjau dari aspek ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan publik, akses terhadap fasilitas sosial, serta kondisi lingkungan permukiman yang cukup memadai. Meskipun demikian, capaian ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kota.

Hasil survei juga menunjukkan adanya sejumlah indikator yang masih mendapat penilaian rendah dari masyarakat, seperti ketersediaan fasilitas kaum disabilitas, penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen, pengendalian biaya hidup, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih terarah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Bima yang semakin layak huni, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.

### **5.2. REKOMENDASI**

1. Memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan akses air bersih.
3. Memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi usia produktif, melalui pengembangan UMKM, industri kreatif, dan sektor ekonomi lokal.
4. Menyediakan program pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan magang yang sesuai dengan potensi daerah.



5. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
6. Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan investor untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
7. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan.
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
9. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah secara berkala.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2018). *Indeks Kota Layak Huni di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Panduan Penilaian Kota Layak Huni di Indonesia*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Tamin, O. Z. (2014). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi Kota Layak Huni*. Bandung: ITB Press.
- UN-Habitat. (2016). *World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2015). *Liveable Cities: Challenges and Opportunities for Developing Countries*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- BNPB. (2020). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Kemenko PMK. (2020). *Indikator Rasa Aman dan Ketertiban Sosial*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
- Kemendagri. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Jurnal Perencanaan Wilayah & Kota, ITB (2019–2023).
- Husein Umar. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian PPN/Bappenas (2015–2022). *Indeks Kota Layak Huni*.
- Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Permendagri No. 86/2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Marans, R.W., & Stimson, R. (2011). *Investigating Quality of Urban Life*. Springer.
- UN-Habitat. (2016). *World Cities Report*.



- UN-Hasbitat. (2017). New Urban Agenda.
- OECD. (2020). OECD Urban Policy Reviews.
- Mercer. (2019). Quality of Living City Ranking.
- Economist Intelligence Unit (EIU). (2022). Global Liveability Index.
- Geurs, K., & Van Wee, B. (2004). Accessibility Evaluation Framework.
- Crowe, T. (2000). Crime Prevention Through Environmental Design.
- Nardo, M. et al. (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators. OECD.
- Kementerian PPN/Bappenas (2015–2022). Indeks Kota Layak Huni.
- Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Permendagri No. 86/2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Marans & Stimson (2011) Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods and Empirical Research.
- Diener (2009) Quality of Life Research.
- UN-Habitat (2017) New Urban Agenda.
- WCED (1987) Our Common Future (Brundtland Report).

**LAMPIRAN I**  
**JADWAL KEGIATAN SURVEY**  
**IKLH & IRA TAHUN 2025**

JADWAL																							
No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Penyusunan SK Tim																						
2	Studi Literatur																						
3	Penyusunan KAK Kegiatan																						
4	Penyusunan Variabel dan Indikator untuk Kuesioner																						
5	Penyusunan Draft Kuesioner																						
6	Rapat Bidang Pembahasan Awal Kuesioner																						
7	Rapat Bidang Pembahasan Kerangka Sampel dan Metode Sampling																						
8	Penyusunan Konsep Definisi Indikator Kuesioner																						
9	Rapat Bersama BPS membahas Kerangka Sampel dan Metode Sampling																						
10	Pengumpulan Data Responden ke Kelurahan																						
11	Rapat Bersama BPS membahas Teknik Pengumpulan Data dan Pemetaan Responden, serta teknik pengolahan data																						
12	Rapat pemantapan kuesioner dan Bimtek surveyor dengan BPS																						
13	Penentuan Jadwal/ Kesepakatan Persiapan Survey																						
14	Pelaksanaan Survey (Pengumpulan Data)																						
15	Penginputan dan Pengolahan Data																						
16	Analisis Data																						
17	Penyusunan Laporan Akhir																						
18	Diseminasi Laporan Akhir																						
19	Evaluasi Kegiatan																						

## LAMPIRAN II



### SURVEI KOTA LAYAK HUNI DAN RASA AMAN TAHUN 2025

BLOK I KETERANGAN RESPONDEN		
101	Kecamatan	<input type="text"/>
102	Kelurahan	<input type="text"/>
103	No Urut Responden	
104	Alamat	
105	Nama Responden	
106	Jenis Kelamin	1. Laki-laki      2. Perempuan
107	Usia	
108	Pendidikan Terakhir	1. Tidak Sekolah      5. D1/D2/D3 2. SD/Sederajat      6. S1/D4 3. SMP/Sederajat      7. S2 4. SMA/Sederajat      8. S3
109	Apakah satu bulan terakhir bekerja <b>(kode 2 --&gt;111)</b>	1. Ya      2. Tidak
110	Pekerjaan <i>(tuliskan detail pekerjaan) *kode lapangan usaha di halaman terakhir</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
111	No HP	
112	Lama Berdomisili	

BLOK II KETERANGAN PENDATAAN				
	Uraian	Nama	Tanggal	Tanda tangan
201	Pendata			
202	Pemeriksa			

BLOK III RINGKASAN		
301	<b>Blok IV Keterangan Kota Layak Huni</b>	Jumlah
	a. Jumlah Jawaban Kode 1	
	b. Jumlah Jawaban Kode 2	
	c. Jumlah Jawaban Kode 3	
	d. Jumlah Jawaban Kode 4	
	e. Jumlah Jawaban Kode 5	
302	<b>Blok V Keterangan Rasa Aman</b>	Jumlah
	a. Jumlah Jawaban Kode 1	
	b. Jumlah Jawaban Kode 2	
	c. Jumlah Jawaban Kode 3	
	d. Jumlah Jawaban Kode 4	
	e. Jumlah Jawaban Kode 5	

BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI		
Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik
401	Menurut pendapat saudara seberapa baik Pemerintah Kota Bima dalam membangun dan menata kota (contoh nya : Penertiban bangunan liar di sempadan sungai dan bahu jalan, Peningkatan dan pelebaran jalan perkotaan, dll )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
402	Menurut pendapat saudara seberapa baik konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang (contoh nya : Satpol PPKota Bima secara rutin melakukan razia pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau area terlarang, azia petasan, minuman keras, dan tempat hiburan)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
403	Menurut pendapat saudara seberapa baik jaminan rasa aman bagi masyarakat di Kota Bima (contoh nya: penambahan CCTV, lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan utama, permukiman, dan jalur rawan kriminalitas)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
404	Menurut pendapat saudara seberapa baik perencanaan pembangunan di Kota Bima (contoh nya: penyampaian rencana pembangunan kota saat mbolo weki atau musrembang di kelurahan/kecamatan)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
405	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh Kota Bima (contoh : Taman Amahami, Taman Kodo, Taman Ria, Lapangan Serasuba, Lapangan PU, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
406	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota	1 - 2 - 3 - 4 - 5
407	Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap kebersihan kota dan lingkungan (contoh nya: penambahan armada pengangkut sampah, Kegiatan rutin penyiraman tanaman dan pemangkasan pohon)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
408	Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap penanganan pencemaran lingkungan (contoh nya: pemasangan spanduk dan papan larangan membuang sampah ke sungai di sejumlah titik)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
409	Menurut pendapat saudara seberapa baik konsistensi Pemerintah Kota Bima dalam menangani banjir (contoh nya: pengerukan sedimen saluran drainase/sungai, perbaikan gorong-gorong, serta pembuatan saluran rainase baru)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
410	Menurut pendapat saudara seberapa baik perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap penanganan kemacetan lalu lintas (contoh nya: saat menjelang hari raya di pasar lama, pasar amahami, dll)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
411	Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam hal perlindungan bangunan bersejarah (contoh nya : menjaga Istana Kesultanan Bima (Asi Mbojo) sebagai cagar budaya utama dan pusat sejarah daerah)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
412	Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal (contoh nya: Festival Rimpu Mantika, biola gambo, dan budaya tenun)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
413	Menurut pendapat saudara seberapa baik penanganan Pemerintah Kota Bima terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen (contoh nya: Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban di tempat-tempat umum seperti perempatan jalan, pasar, terminal, dan area wisata)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
414	Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menyediakan penghidupan yang layak (contoh nya: Pelatihan/pembinaan UMKM, Bantuan modal usaha dan alat produksi bagi pelaku UMKM)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
415	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif (contoh nya: adanya kegiatan Jobfair, penyerapan formasi ASN, PPPK, dan tenaga kontrak daerah)	1 - 2 - 3 - 4 - 5

BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI (LANJUTAN)		
Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik
416	Menurut pendapat saudara seberapa baik komitmen Pemerintah Kota Bima mengendalikan biaya hidup ( <i>contohnya: operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dll</i> )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
417	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan media komunikasi yang mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya ( <i>contohnya: media sosial Pemerintah, E-lapor, Saninu, Sp4n-Lapor, dll</i> )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
418	Menurut pendapat saudara seberapa baik tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga	1 - 2 - 3 - 4 - 5
419	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas petunjuk/informasi perkotaan ( <i>contohnya: papan petunjuk arah, papan nama jalan, rambu informasi, peta kota</i> )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
420	Menurut pendapat saudara seberapa baik angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama ( <i>contohnya: Bemo, Ojek Pangkalan, Ojek Online (gojek/grab), dll</i> )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
421	Menurut pendapat saudara seberapa baik kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat	1 - 2 - 3 - 4 - 5
422	Menurut pendapat saudara seberapa baik kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan ( <i>contohnya: zebra cross, trotoar, dll</i> )	1 - 2 - 3 - 4 - 5
423	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
424	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
425	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
426	Menurut pendapat saudara seberapa baik fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh Kota Bima	1 - 2 - 3 - 4 - 5
427	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari	1 - 2 - 3 - 4 - 5
428	Menurut pendapat saudara seberapa baik sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat	1 - 2 - 3 - 4 - 5
428.a	Apakah saudara melakukan pemisahan/pemilahan sampah sebelum di buang? ( <i>seperti pemilahan Sampah Organik dan NonOrganik</i> )	1. Ya                      2. Tidak
428.b	Bagaimana Saudara Mengelola Sampah ?	1. Dibakar 2. Membuang Sendiri ke TPSTerdekat 3. Sampah Langsung diangkut Petugas 4. Buang ke Sungai 5. Lainnya .....

**BLOK IV KETERANGAN KOTA LAYAK HUNI (LANJUTAN)**

Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)	
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik	
429	Menurut pendapat saudara seberapa baik ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan	1 - 2 - 3 - 4 - 5	
429.a	Sumber Air untuk Kebutuhan sehari-hari selain Air Minum	1. Air Kemasan Bermerek 2. Air Isi Ulang 3. Leding/PDAM 4. Sumur Bor/Pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung	7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air Permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya
429.b	Sumber Air untuk Kebutuhan Air Minum	1. Air Kemasan Bermerek 2. Air Isi Ulang 3. Leding/PDAM 4. Sumur Bor/Pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung	7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air Permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya
430	Menurut pendapat saudara seberapa baik Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh Kota Bima <i>(contohnya: toilet/ jamban sehat, saluran drainase)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	

**BLOK V KETERANGAN RASA AMAN**

Pertanyaan (refensi waktu setahun terakhir)		Jawaban (lingkari)	
		1. Sangat Buruk 2. Buruk 3. Cukup 4 Baik 5. Sangat Baik	
501	Menurut pendapat saudara seberapa baik kebijakan Pemerintah Kota Bima terhadap keamanan dan ketertiban <i>(contohnya: Program pengadaan CCTV, patroli rutin, penerangan jalan umum, operasi penertiban PKL)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	
502	Menurut pendapat saudara seberapa baik kebijakan Pemerintah Kota Bima terhadap Siskamling di Kota Bima <i>(contohnya: adanya edaran Pemerintah untuk siskamling di lingkungan saat menjelang Pilkada)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	
503	Menurut pendapat saudara seberapa baik kinerja Pemerintah Kota Bima terhadap keamanan <i>(contohnya: patroli rutin, penerangan jalan umum, CCTV, dan sosialisasi kamtibmas)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	
504	Menurut pendapat saudara seberapa baik kondisi sosial kemasyarakatan di Kota Bima <i>(contohnya: nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong ditengah-tengah masyarakat)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	
505	Menurut pendapat saudara seberapa baik program dan kebijakan serta kinerja Pemerintah Kota Bima terhadap daerah rawan /risiko bencana <i>(contohnya: program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) melatih warga di wilayah rawan banjir dan longsor)</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5	

## BLOK VI CATATAN

### \*) Kategori Lapangan Usaha

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Pertanian tanaman padi dan palawija  | 15 | Informasi dan komunikasi  |
| 2  | Hortikultura   | 16 | Aktivitas keuangan dan asuransi   |
| 3  | Perkebunan   | 17 | Real estat  |
| 4  | Perikanan  | 18 | Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis   |
| 5  | Peternakan   | 19 | Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya |
| 6  | Kehutanan dan pertanian lainnya  | 20 | Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial   |
| 7  | Pertambangan dan penggalian  | 21 | Pendidikan  |
| 8  | Industri pengolahan  | 22 | Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial  |
| 9  | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin   | 23 | Kesenian, hiburan, dan rekreasi   |
| 10 | Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi | 24 | Aktivitas jasa lainnya  |
| 11 | Konstruksi   | 25 | Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja  |
| 12 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor                   | 26 | Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya  |
| 13 | Pengangkutan dan pergudangan   |    |   |
| 14 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum  |    |   |



### LAMPIRAN III

#### SURVEI INDEKS KOTA LAYAK HUNI KOTA BIMA 2025

##### LOKASI SURVEI: KELURAHAN NTOBO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PARUGA





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN NAE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN SARAE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN TANJUNG





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PANE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN DARA





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN KUMBE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN LAMPE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN DODU





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN NUNGA





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN KODO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN OI'FOO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN LELAMASE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN OIMBO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN MELAYU





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN JATIWANGI





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN JATIBARU





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN KOLO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN JATIBARU TIMUR





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN ULE



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PENARAGA





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RONTU





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PENANAE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN NITU





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RABANGODU SELATAN



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RABADOMPU TIMUR





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RABANGODU UTARA



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RITE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN RABADOMPU BARAT



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN MONGGONAO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN SADIA





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN SANTI



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN SAMBINAE





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PENATOI





**LOKASI SURVEI: KELURAHAN LEWIRATO**



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN MANDE



## LOKASI SURVEI: KELURAHAN PANGGI





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN MANGGEMACI



LOKASI SURVEI: KELURAHAN MATAKANDO





## LOKASI SURVEI: KELURAHAN KENDO





**LAMPIRAN IV**  
**HASIL PENGOLAHAN DATA PERKELURAHAN**

No	Kecamatan	IKLH	IRA	No	Kelurahan	IKLH	IRA
1	Rasanae Barat	73,19	71,6	1	PARUGA	74,38	72,38
				2	NAE	71,46	70,88
				3	SARAE	73,53	71,68
				4	TANJUNG	72,30	70,13
				5	PANE	73,63	73,19
				6	DARA	73,73	72,06
2	Mpunda	74,69	74,74	7	Monggonao	76,67	75,22
				8	Sadia	70,43	72,32
				9	Santi	72,57	72,44
				10	Sambinae	73,88	73,29
				11	Penatoi	75,36	77,02
				12	Lewirato	80,17	80,60
				13	Mande	77,21	80,00
				14	Panggi	74,33	73,29
				15	Manggemaci	73,02	71,80
				16	Matakando	75,56	73,66
3	Rasanae Timur	73,18	73,93	17	Kumbe	73,35	72,95
				18	Dodu	71,11	71,15
				19	Nungga	74,64	75,04
				20	Kodo	75,00	78,73
				21	Lelamase	73,24	75,62
				22	Oi Mbo	73,96	73,26
				23	Lampe	73,46	72,25
				24	Oi Foo	72,32	74,86
4	Raba	73,02	75,23	25	Penaraga	75,37	75,05
				26	Rontu	75,31	78,67
				27	Penanae	72,79	74,76
				28	Kendo	70,83	77,00
				29	Ntobo	70,83	78,90
				30	Nitu	72,50	77,00
				31	Rabangodu Selatan	75,15	76,30
				32	Rabadompu Timur	72,31	71,08
				33	Rite	73,36	75,00
				34	Rabadompu Barat	70,04	71,02
				35	Rabangodu Utara	73,55	77,14
5	Asakota	73,39	74,91	36	Melayu	71,77	71,00
				37	Jatiwangi	76,12	75,33
				38	Jatibaru	78,82	85,31
				39	Kolo	70,46	72,75
				40	Jatibaru Timur	68,58	71,16
				41	Ule	72,46	72,47



LAPORAN HASIL SURVEI

**INDEKS** KOTA LAYAK HUNI

**2025**

Jalan Gajah Mada No. 90

Raba – Bima – NTB

Email: [statistiksektoral@bimakota.go.id](mailto:statistiksektoral@bimakota.go.id)

website: [www.1data.bimakota.go.id](http://www.1data.bimakota.go.id)